

**QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) SEBAGAI
STRATEGI SURVIVE USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI MASA PANDEMI DI KOTA KEDIRI**

Sri Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, Risa Rahmah
IAIN Kediri

Abstract

One of the impacts of this pandemic is MSME actors who must be prepared for new consumer patterns and behaviors. Adaptation to technological advances must be carried out by MSME actors to be able to survive. Bank Indonesia as Indonesia's central bank made a breakthrough to use QRIS as a way for MSMEs to survive this pandemic. The results of this study were tested using a qualitative approach, with interviewees for MSME actors represented by 5 (five) MSME actors in each sub-district in the city of Kediri. The benefits obtained from QRIS are convenience for transactions with consumers without using cash, and being able to easily implement health protocols with consumers. Meanwhile, the obstacles that occur are internet connectivity that is not smooth, data costs are quite expensive and the perpetrators are not confident. From the Department of Cooperatives and SMEs of Kediri City, there have been many policies that have been carried out to be able to support the survive of SMEs in Kediri, namely the existence of training and the existence of cooperatives for SMEs. And QRIS in Kediri City showed that as many as 53% expressed interest in using QRIS for their trade transactions.

Keywords: *QRIS, MSME*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peradaban baru dunia seakan muncul dengan adanya krisis kesehatan akibat adanya virus Covid 19. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus siap melawan perkembangan wabah atau pandemic Virus Covid 19 dari berbagai sector. Pandemi ini bukan hanya berbicara masalah kesehatan akan tetapi juga bicara masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang mengacu pada kesehatan adalah dengan memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat, pelayanan kesehatan untuk penderita sakit di rumah sakit, sosialisasi protocol kesehatan. Adapun bantuan sosial di berikan kepada masyarakat yang terdampak pandemic, antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja, PKH, dan bantuan-bantuan lainnya. Sedangkan untuk bidang ekonomi,

yaitu adanya restrukturisasi dan *rescheduling* bagi nasabah yang mempunyai pembiayaan di perbankan terkhusus pada pelaku usaha, Sosialisasi teknologi digital sebagai bentuk cara usaha baru kepada pelaku usaha.

Loncatan teknologi terjadi akibat adanya pandemic, semua yang sebelumnya terasa sesuatu yang mustahil dilakukan, maka hal tersebut menjadi budaya. Salah satu yang sekarang sudah menjadi sebuah budaya adalah perkembangan transaksi on line. Perkembangan Teknologi Digital (TD) sekarang ini menunjukkan pergerakan kedepan dan maju, semakin jauh dan cepat bila diperbandingkan dengan apa yang menjadi tujuan dan yang dibayangkan. TD tersebut tidak hanya menunjukkan pergerakan dari tradisional perbankan kedalam digitalisasi dunia, dan menunjukkan penyebaran ke hampir masuk kedalam aspek kehidupan. Merujuk dalam kaca mata industri perbankan, TD adalah salah satu perubahan yang harus dilakukan dan sangat penting bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan untuk mempelajari, berinteraksi dan memberikan kepuasan nasabah. Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dengan cepat merespon adanya pola yang berubah, bahkan sebelum pandemic terjadi di Indonesia Bank Indonesia sudah mengeluarkan produk yang menggunakan teknologi.

Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan teknologi digital adalah dengan membuat produk yang berupa pengenalan dan peluncuran produk standar kode respons cepat alias *Quick Response* (QR) code yang ditujukan untuk pembayaran pada transaksi melalui sebuah aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking, yang bernama *QR Code Indonesian Standard* (QRIS). Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam berkembangnya laju pertumbuhan ekonomi.

QRIS hadir pada saat bangsa Indonesia belum berjuang melawan pandemic, ini menunjukkan kesiapan dan kepekaan Bank Indonesia dalam memprediksi pangsa transaksi kedepan dan perilaku konsumennya. Berdasarkan data menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan QRIS di awal pandemic yaitu pada Maret 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 tercatat 5,8 Juta *merchant* (pedagang ritel) nasional. Nilai ini menunjukkan peningkatan sebanyak 88%, dan sebagian besar di sumbang dari UMKM yaitu sebanyak 3,6

juta dan mikro kecil 1,3 juta. Hasil ini untuk mikro kecil menunjukkan peningkatan sebesar 316%.¹

Data tersebut diatas menunjukkan, suatu adanya sebuah loncatan atau tranformasi digital yang sangat efisien dan efektif yang dimulai dari sebuah pemahaman atas sebuah perilaku nasabah secara digital. Dan perubahan / transformasi ini menggambarkan bahwa memimpin atas sebagian besar atau mayoritas atas perubahan organisasi, dari produk-sentris beralih pada sudut pandang nasabah-sentris. Perkembangan UMKM di Indonesia sebelum masa pandemic nampak pada table di bawah ini:

Tabel 1. Data Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2010 – 2019

Tahun	Jumlah UMKM *(Juta)
2010	52,7
2011	54,1
2012	55,2
2013	56,5
2014	57,9
2015	59,2
2016	61,6
2017	62,9
2018	64,2
2019	65,4

Sumber: Data Kemenkopukm²

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Kediri, jumlah UMKM di kota Kediri meningkat dari tahun 2014 sebanyak 2.600 usaha menjadi 3.100 di tahun 2015. Tercatat sampai pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota Kediri menyentuh angka 7,02 %, dengan jumlah UMKM terdaftar sebanyak 4.668. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Kediri juga didukung dengan mudahnya perizinan tempat melapak di *Car Free Day* Jln. Dhoho. Pedagang hanya harus mengurus surat ijin langsung atau mendaftar di Dinas Perhubungan Kota Kediri dan selanjutnya akan dicarikan tempat melapak jika masih ada tempat kosong. Tentu saja tidak ada pungutan bagi para pedagang. Perijinan ini juga dilakukan agar terciptanya ketertiban untuk para pedagang. Sebagai bahan

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/umkm-pengguna-qris-meningkat-316-selama-pandemi-covid-19>

²<https://kemenkopukm.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.16 WIB

komparasi besaran jumlah UMKM di Kediri dengan di Indonesia, berikut adalah table jumlah UMKM di Kota Kediri:

Tabel 2. Pertumbuhan UMKM di Kota Kediri Tahun 2014- 2019

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah UMKM	2.600 Usaha	3.100 Usaha	3.370 Usaha	3.500 Usaha	3.806 Usaha	4.668 Usaha

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Kota Kediri berdasarkan data diatas menunjukkan perkembangan UMKM juga cukup pesat, hal tersebut sesuai yang disampaikan Tristanto selaku kepala dinas koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja (UMTK), yaitu Kota Kediri mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik yang terjun di sektor makanan, minuman, kerajinan, batik, tenun, dan yang lainnya, dilansir dari radar Kediri. Atas capaian tersebut tidak mengherankan bahwa Kota Kediri pernah menjadi Kota dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia pada tahun 2018.

Tabel 3. Pendapatan Per Kapita Tertinggi di Indonesia tahun 2018

No.	Kota	PDRB Per Kapita (jutaan rupiah)
1.	Kediri	449,23
2.	Bontang	337,95
3.	Jakarta	249,30
4.	Cilegon	223,95
5.	Surabaya	188,73
6.	Balikpapan	147,37
7.	Tarakan	120,88
8.	Batam	112,66
9.	Dumai	108,78
10.	Makassar	106,22

Sumber: Data Badan Pusat Statistik³

Kebijakan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak (*physical distancing*), sejak awal Maret strategi bisnis UMKM harus mengalami perubahan yang radikal (Agestayani et al., 2020).

³<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/11> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.32 WIB

Penelitian oleh Ummu Habibah dan Kirana Edenela dari Universitas Negeri Semarang menyatakan sejatinya metode pembayaran cashless atau non-tunai merupakan hal yang penting untuk diterapkan guna mencegah penyebaran virus Corona melalui uang yang digunakan sebagai metode pembayaran secara tunai (Habibah et al., 2020). Penggunaan transaksi digital di masa pandemi Covid-19 meningkat pesat karena pemberlakuan *physical distancing* hingga PSBB karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti menghindari kontak langsung dan risiko penularan Covid-19.

UMKM dipaksa untuk bisa segera beradaptasi dan berinovasi, seperti dengan mengadopsi model bisnis digital. Dengan jumlah 132 juta pengguna internet di Indonesia, industri *fintech* (*financial technology*) berupaya mengoptimalkan potensi tersebut dengan menawarkan berbagai bentuk produk keuangan yang memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam mengakses layanan keuangan. Produk keuangan digital seperti *Go-Pay*, *OVO*, *Dana*, dan masih banyak lagi (Setiawan & Mahyuni, 2020).

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pembayaran digital menggunakan QRIS merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah suatu sistem transaksi atas sebuah pembayaran dengan basis *shared delivery channel* yang berguna untuk menstandarisasi transaksi atas pembayaran yang melalui QR Code. Sistem ini dirintis oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

QRIS memberikan alternatif metode system transaksi pembayaran yang tidak di bayar secara langsung / non-tunai secara lebih efektif dan efisien, melalui penggunaan satu standar QR Code, penyedia barang dan jasa (*merchant*) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari penerbit (misal LinkAja, OVO, Gopay, Dana) yang berbeda. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta memberikan keterangan, bahwa sampai dengan 30 April 2021 banyaknya total *merchant* yang sudah menggunakan dan mengimplementasikan QRIS telah mencapai 6,99 juta *merchant*. Dari angka tersebut, sebanyak 85% diantaranya adalah pengusaha UMKM. Penerapan QRIS di usaha mikro menengah telah mencapai 4,27 juta, usaha kecil 1,73 juta, usaha menengah 636 ribu, dan usaha regional mencapai 18.253 *merchant* (Suheriadi,

2021). Sedangkan pada awal tahun 2021, Bank Indonesia menargetkan 12 juta *merchant* QRIS di seluruh Indonesia. Sasarannya adalah UMKM, warung tradisional atau toko kelontong, lembaga sosial, dan lain sebagainya.

Penggunaan QRIS menjadi *trend* positif belakangan ini bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Mengingat manfaatnya dalam membantu proses transaksi non-tunai secara lebih efisien dan meminimalisir kontak fisik, penggunaan QRIS oleh warung tradisional atau toko kelontong dapat membantu meningkatkan kinerja usaha sekaligus mengurangi risiko penyebaran Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Kediri pada saat pandemic Corona?
2. Apa Kendala dan Hambatan yang terjadi pada penerapan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Kediri pada saat pandemic Corona.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang terjadi pada penerapan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Kediri.

D. Kajian Pustaka

a. Pengertian UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengacu pada jenis usaha kecil yang telah mempunyai / memiliki asset / kekayaan netto paling banyak Rp. 200.000.000, dengan ketentuan hal tersebut tidak termasuk atas aset tanah dan bangunan tempat usaha. Definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh personal perorangan dan atau badan usaha perseorangan dimana dalam Undang-Undang telah ditetapkan standar untuk usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,-.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang tidak dimiliki secara langsung, dikuasai, oleh sebagian dari anak perusahaan atau cabang dari suatu usaha menengah atau besar. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau jumlah pendapatan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- maksimal Rp. 2.500.000.000,-.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh perseorangan dan atau badan usaha yang tidak dimiliki secara langsung, dikuasai, oleh sebagian dari anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang mempunyai standar usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau pendapatan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- hingga 50.000.000.000,-⁴

b. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif pertumbuhan dan perkembangannya, UMKM dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:⁵

1) Livelihood Activities

Livelihood Activities adalah UKM yang diklasifikasikan sebagai usaha sektor informal, dimana akan digunakan sebagai sebuah kesempatan kerja dan juga untuk mencari nafkah. Contoh: pedagang kaki lima.

2) Micro Enterprise

Micro Enterprise adalah UKM yang bersifat pengrajin, tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan. Dalam mengembangkan usahanya

3) Small Dynamic Enterprise

Small Dynamic Enterprise adalah usaha kecil menengah yaitu berwirausaha dengan cara saling menjalin kerjasama dan juga mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4) Fast Moving Enterprise

⁴Dr. Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia (Perspektif Hukum Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 113-114.

⁵Ade Resalawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ssyarif Hidayatullah Jakarta*, 2011, 31.

Fast Moving Enterprise adalah usaha kecil menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah mampu untuk melakukan ekspor dan menjadi Usaha Besar (UB).

c. Peran UMKM

Peran UMKM dalam sebuah perekonomian dan stabilitas ekonomi dapat dilihat dari manfaat dan kontribusi pelaku UMKM terhadap besaran lapangan / lowongan kerja, pemerataan penghasilan / pendapatan, pembangunan/kemajuan ekonomi pedesaan, penggerak atas peningkatan ekspor manufaktur atau non migas, juga dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa alasan yang membahas atas pentingnya pertumbuhan dan pengembangan pelaku UMKM yaitu atas sifat fleksibilitas dan adaptabilitas pelaku UMKM dalam mendapatkan / memperoleh bahan baku mentah dan peralatan, hubungan / relevansi atas pelaku UMKM dalam kegiatan ekonomi yang mempunyai guna untuk menunjang kegiatan yang ditujukan pada sektor ekonomi yang lain, serta adanya potensi besar pada pelaku UMKM dalam menciptakan dan memperluas adanya lowongan / lapangan kerja.⁶

UMKM hadir menjadi salah satu penyeimbang atas komunitas perekonomian dan alur perdagangan. Hadir pada level middle yang memiliki hubungan rantai distribusi pendek dan langsung. Hal ini yang menjadikan lebih bisa bertahan atas segala guncangan ekonomi, karena banyak efisiensi dan efektivitas yang dapat dilakukan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha perdagangannya.

Telah banyak bukti yang terjadi, bahwa bila keadaan perekonomian suatu negara sedang tidak stabil dan melemah maka mempunyai dampak pada UMKM yaitu dengan tidak dapat survive. Begitu juga dengan adanya krisis kesehatan / covid 19 menunjukkan banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usaha bila tidak dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sektor industry rumah tangga merupakan sector yang paling terdampak dengan adanya pandemic Covid 19.⁷Dengan adanya pandemic ini banyak mengakibatkan terganggunya rantai pemasok, distribusi penjualan, dan transportasi secara global

⁶Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu- Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 28.

⁷Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

sehingga pendapatan menjadi menurun.⁸ UMKM diharapkan dapat betransformasi dengan fenomena pandemic dengan memahami konsep perubahan perilaku konsumen. Adanya transformasi offline ke online pada awalnya akan membutuhkan kerja ekstra pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi. Dengan adanya pandemic ini menunjukkan adanya perubahan pasar secara langsung menjadi pasar virtual atau online.⁹

d. Pengertian QRIS

Quick Response Code atau QR Code merupakan bentuk kemajuan teknologi yang pertama kali di ciptakan di negara Jepang pada tahun 1994 dalam wujud barcode dengan dua dimensi. Penciptaan ini pada awalnya ditujukan untuk keperluan kebutuhan pendataan pada inventarisasi alat pada produk suku cadang kendaraan dengan perkembangannya sekarang sudah merambah pada transaksi bisnis jasa dan marketing. Banyak yang mendeskripsikan QR Code adalah sebuah kode yang dapat dibaca dan terjemahkan dengan kecepatan yang tinggi.¹⁰Keunggulan dan kemanfaatandari QR Code yaitu dengan secara vertical serta horizontal mampu untuk menyimpan informasi. Hal ini yang mengakibatkan bahwa QR Code lebih daripada yang masih satu dimensi.¹¹

e. Manfaat QRIS

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan awal dari dikenalkannya QRIS. GPN dihadirkan untuk dapat sebagai media yang mensosialisasikan suatu system yang distandarkan, switching, dan services yang telah dikuatkan oleh regulasi yang kuat serta adanya mekanisme aturan yang saling terintegrasi dengan kanal pembayaran secara nasional. Standar yang ditetapkan adalah terspesifikasi teknis dan secara operasional secara baku.

Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, dan juga memiliki modul hitam yang digambarkan berupa persegi titik atau piksel, dan serta

⁸ Kumar, A., Luthra, S., & Kumar, S. (2020). COVID-19 impact on sustainable production and operations management. 1(May), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2020.06.001>

⁹ Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117(June), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008>

¹⁰ Rouillard, J. (2008). Contextual QR Codes, *Proceedings of the Third International. Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology*.

¹¹ Burnie, David. 2007. *Jendela IPTEK*: Cahaya. Jakarta: Balai Pustaka. Gabriel, J.F. 1988. *Fisika Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

memiliki sebuah kemampuan untuk menyimpan sebuah data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi sebuah transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.

Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia telah membuat kebijakan yaitu dengan menetapkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS yang diartikan sebagai *Standar QR Code* Pembayaran dan dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi-transaksi pembayaran di negara Indonesia. Transaksi QRIS banyak yang mempunyai persepsi arti sebuah transaksi pembayaran yang telah difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS. Adapun Lembaga Switching merupakan sebuah lembaga yang akan menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG). Sedangkan penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Sedangkan penerbit di definisikan sebagai penerbit yang dalam ketentuan Bank Indonesia adalah yang menata dan mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Acquirer ditata / diatur oleh ketentuan Bank Indonesia yaitu mengatur dan menata tentang adanya alat pembayaran uang elektronik. Sedangkan untuk *Merchant Aggregator* adalah pihak yang selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil transaksi QRIS kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Untuk *Merchant Repository* yang biasanya disingkat NMR adalah sebuah sistem yang juga memiliki kemampuan untuk menatausahakan sebuah data pedagang (*merchant*) Pedagang (*merchant*) QRIS diartikan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang sudah tercatat dalam NMR siap untuk sebuah menerima transaksi QRIS. Manfaat QRIS digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *just scan and pay*

- a) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai dan cepat serta kekinian
- b) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

2. Bagi Merchant:

- a) Meningkatkan branding dan Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerimapembayaran berbasis QR apapun.
- b) Kekinian dan lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
- c) Mengurangi biaya pengelolaan kas dan terhindar dari uang palsu.
- d) Tidak perlu menyediakan uang kembalian dan transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- e) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal dan memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- f) Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berpijak pada Chua (1986) yang menguraikan bahwa metode ini focus dan menekankan pada hipotesis-deduktif dan ada keterbatasannya yaitu dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Atas keterbatasan tersebut, maka akandiperlukan adanya sebuah metode yang membantu / alternatif yang nantinya bisa menjawab pertanyaan-pernyataan yang tidak bisa dijawab dengan metode penelitian kuantitatif. Metode yang diuraikan adalah metode kualitatif.¹³

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, adalah dapat menggunakan metode yaitu :observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Dari banyaknya pilihan metode pengumpulan data tersebut adalah yang paling banyak digunakan adalah metode interview dan focus group discussion (FGD). Langkah selanjutnya atas data yang telah dikumpulkan maka akan di analisis untuk dapat dipahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut.¹⁴

¹²<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

¹³Chua, W.F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.

¹⁴Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal* Volume 204 No.6. DOI: 10.1038/bgi.2008.192

Guna mendukung untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, maka penelitian ini akan melakukan interview dengan beberapa UMKM yang telah menggunakan QRIS di Kota Kediri. Pemilihan interviewer dilakukan secara acak, dengan mengambil keterwakilan UMKM pada kecamatan yang ada di Kota Kediri. Di Kota Kediri ada 3 kecamatan, yaitu kecamatan kota, kecamatan Pesantren dan kecamatan Mojojoto. Total UMKM yang akan di interview ada sebanyak 15 pelaku UMKM, dengan masing-masing 5 pelaku UMKM yang akan mewakili setiap kecamatan. Dan juga melakukan interview kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Dari hasil interview tersebut akan di simpulkan secara deskriptif.

Karakteristik interviewer adalah sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM yang berada pada wilayah yang di teliti;
2. Telah menggunakan QRIS lebih dari 6 bulan;
3. Tercatat sebagai anggota UMKM Kota Kediri di Dinas Koperasi Kota Kediri;

Dari hasil interview maka akan di sampaikan secara deskriptif yang kemudian akan dikomparasikan hasilkan untuk dapat di tarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan UMKM akan dapat bertahan dengan persangain usaha dan ketidakstabilan ekonomi di saat pandemic apabila bisa memiliki adaptasi yang tinggi dengan adanya perubahan prilaku konsumen. Unsur sumber daya manusia dan fasilitas transaksi yang mengikuti perkembangan globalisasi adalah kunci keberhasilan UMKM masa pandemic.¹⁵ Dengan ‘melek teknologi’ maka akan dapat memperluas jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran, sehingga konsumen dengan identitas jauh dari toko tetap bisa melakukan transaksi, yang secara offline adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dengan ini maka omzet penjualan seharusnya akan mengalami peningkatan secara significant.¹⁶ Teknologi transaksi secara on line yang biasa di kenal yaitu teknologi e-commerce dapat

¹⁵Nurlinda, N., Napitupulu, I., Wardayani, W., Azlina, A., Andina, A., Ulfah, A., & Supriyanto, S. (2020). Can E-Commerce Adoption Improve SME's Performance? (Case Studies on Micro, Small and Medium Enterprises with Gojek Services in Indonesia). <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2290850>

¹⁶Suryadi, D. F., & Ilyas, M. I. F. (2018). Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula. *Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora*, 2018, 75–80.

memenuhi strategi pemasaran produk sehingga berefek pada peningkatan penjualan.¹⁷

Kebijakan pemerintah atas dukungan kepada pelaku UMKM adalah juga factor yang dominan bukan hanya kemampuan pelaku UMKM melakukan adaptabilitas teknologi dalam transaksi. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung pelaku UMKM bisa survive adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian restrukturisasi kredit perbankan atau perusahaan pembiayaan;
- b) Subsidi bunga kredit;
- c) Penundaan angsuran;
- d) Insentif perpajakan.

Penguatan yang tumbuh dari dalam dan serta adanya dukungan dari luar akan menjadikan semakin menguatkan UMKM sehingga dapat menyokong perekonomian. Keunggulan yang dimilikinya yaitu :seperti kemampuan fokus yang spesifik, dan adanya fleksibilitas nasional, serta dengan biaya rendah, dan didukung oleh adanya kecepatan inovasi.

Potensi UMKM yang didasarkan pada regulasi yaitu : UU No. 20 tahun 2008 maka dapat diketahui bahwa UMKM berpotensi dapat mengentaskan kemiskinan karena tingginya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM; UMKM juga memiliki berperan atas pemerataan ekonomi masyarakat, UMKM juga berpotensi sebagai sumber devisa Negara. UMKM memiliki fungsi dan peran dapat memberikan pertumbuhan ekonomi karena adanya penghasilan UMKM yang di dapatkan untuk kemudian dapat mengisi kas pemerintah lewat setoran pajak.¹⁸

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi

¹⁷Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.3309>

¹⁸Resyniar, G. (2013). Persepsi Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya*.

QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional. Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk *quick response code*.

Agar penggunaan *quick response code* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran yang diberi nama *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*. Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan quick response code untuk pembayaran. Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.

Pemerintah kota Kediri pun memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya dengan cara melakukan penertiban untuk UMKM di Kota Kediri. Konsep penertiban untuk UMKM adalah dengan:

- a) Adanya batasan jam beroperasi, aturan ini disesuaikan dengan area / wilayah;
- b) Kebersihan area / wilayah lapak UMKM;
- c) Penataan arus lalu lintas jalan yang terdapat UMKM;

Para pelaku UMKM/ pedagang juga dipermudah dalam hal perizinan untuk membuka lapak / melapak. Dari wawancara dengan ibu Widya Retno Puspasari selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, ada beberapa jalur untuk perizinan melapak bagi para pelaku UMKM/ pedagang, diantaranya:

1. KORWETA (Koperasi RW se-Kecamatan Kota)

Melalui KORWETA, para pedagang biasanya mendaftar secara mandiri ke RW setempat, lalu kemudian diajukan oleh kepala RW yang bersangkutan sebagai perwakilan dari daerahnya untuk kemudian diserahkan formulir pengajuannya pada KORWETA.

2. Binaan UMKM Kota Kediri

Untuk UMKM yang telah menjadi anggota akan mengikuti binaan/ pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri .

3. Himpunan Koperasi Kota Kediri

Para pedagang yang tergabung dalam koperasi Kota Kediri bisa mendaftar langsung di badan Koperasi.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Para pedagang bisa mendaftar langsung ke DISPERINDAG yang nantinya akan diberi tempat jika masih ada tempat untuk membuat lapak.

Banyak program yang telah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri untuk pelaku UMKM Kota Kediri, antara lain:

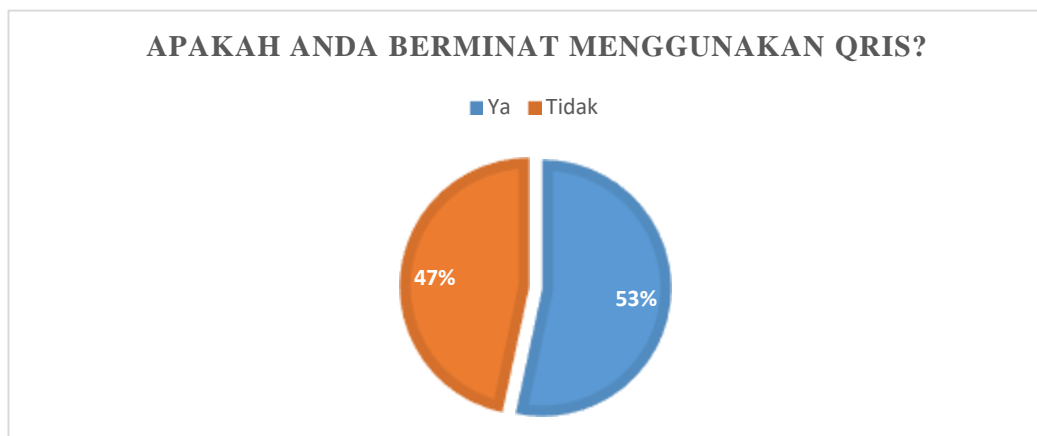
- a) Pelatihan yaitu melalui KORWETA;
- b) Binaan UMKM Kota Kediri;
- c) Himpunan Keperasi kota Kediri.¹⁹

Konsep pelatihan dilakukan secara continue bagi pelaku UMKM di Kota Kediri, dan tema yang akan di tentukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelaku UMKM. Selain itu, wadah lain juga untuk memudahkan sosialisasi untuk pelaku UMKM, yaitu adanya group WA Klinik UMKM Kota Kediri.

Berdasarkan interview yang dilakukan kepada pelaku UMKM yang terwadah pada anggota WAG Klinik UMKM, maka dapat diketahui minat pelaku UMKM Kota Kediri atas penggunaan QRIS adalah sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara dengan ibu Widya Retno Puspasari selaku KASUB. BAG. Umum dan Kepegawaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Gambar 1. Minat Menggunakan QRIS



Sumber: Obsevasi lapangan

Berdasarkan angket secara acak kepada pedagang / pelaku UMKM di Kota Kediri menunjukkan bahwa ada 53% pelaku UMKM yang sangat tertarik untuk menggunakan QRIS. Kalaupun ada yang belum tertarik itu banyak disebabkan oleh belum adanya perlengkapan / fasilitas yang dimiliki pedagang/pelaku UMKM untuk dapat mengoperasikan QRIS. Selain itu, ada rasa tidak percaya diri pada pelaku UMKM dengan kemampuan dirinya untuk dapat melakukan transaksi perdagangan dengan QRIS.

Berdasarkan interview atas pendapat pelaku UMKM tentang factor kemanfaatan dan kendala menunjukkan bahwa adanya semangat bahwa pelaku UMKM Kota Kediri sangat antusias. Manfaat yang diutarakan oleh partisipan yaitu sebagai alternatif metode pembayaran dan mengurangi kontak fisik. Selain itu, dengan QRIS dapat lebih terinci transaksinya dan tercatat dengan baik. Akan tetapi hal yang membuat pelaku UMKM menjadi kurang antusias adalah bila daerah/wilayah UMKM adalah wilayah yang sinyalnya kurang bagus. Akhirnya banyak yang trouble sehingga kadang transaksi menjadi terganggu. Berdasarkan hasil interview maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Interview Faktor Manfaat dan Kendala QRIS

Faktor-Faktor Analisa	Jumlah Interviewer	Keterangan
Manfaat : a. Alternatif metode pembayaran b. Mengurangi kontak fisik	15 15	Dari semua interviewer menyatakan bahwa QRIS bisa sebagai alat untuk mempermudah pembayaran dan bisa sebagai alat protokol kesehatan.

Kendala :		
a. Koneksi internet tidak stabil	15	Dari semua interviewer juga memiliki argumentasi bahwa yang dijadikan kendala adalah internetnya, baik biayanya maupun koneksinya.
b. Kuota habis	15	
c. Biaya penggunaan	15	

Sumber: Interview lapangan

QRIS prinsip operasionalnya adalah dengan terhubung dengan rekening bank dari pemilik toko, sehingga nilai nominal yang dibayarkan atas transaksi oleh konsumen akan secara otomatis terinput / masuk ke rekening terdaftar. Kemudahan tersebut maka transaksi akan lebih efisien karena penjual tidak akan menyiapkan uang kembalian dan kepastian nilai atas transaksi dapat diketahui saldonya. Dengan menggunakan QRIS, proses transaksi non-tunai lebih efisien dan aman digunakan saat pandemi covid-19. Proses pendaftaran untuk mendapatkan QRIS adalah dengan memproses pendaftaran *merchant* melalui OVO. Pendaftaran *merchant* OVO dapat dilakukan secara *online* melalui kanal pendaftaran yang disediakan OVO dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang harus diunggah, misalnya kartu identitas dan foto lokasi usaha. Setelah pendaftaran dilakukan, *merchant* harus menunggu persetujuan dari pihak OVO lebih kurang 2x24 jam. Setelah pendaftaran diterima dan disetujui oleh OVO, *merchant* wajib memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan OVO Merchant (*FAQ OVO Merchant*, 2017).

Hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, untuk meningkatkan motivasi pemilik toko kelontong untuk menggunakan QRIS. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membantu menekan penyebaran covid-19.

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat khususnya 16 responden sekaligus pemilik toko kelontong terkait pemanfaatan teknologi dalam pembayaran non-tunai. Diharapkan partisipan dapat termotivasi dan tertarik untuk mulai menerapkan metode pembayaran non-tunai menggunakan QRIS.
2. Meningkatkan minat masyarakat dalam mengimplementasikan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS sekaligus meminimalisir penyebaran covid-19 dengan mengurangi penggunaan uang kartal dan *e-money* serta QRIS sebagai alternatif pembayaran.

Kota Kediri menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan pada pelaku UMKM menunjukkan capaian bahwa pengangguran terbuka adanya peningkatan akan tetapi nilainya kecil bila dibandingkan dengan kota lainnya, yaitu hanya naik 1,99 %. Sedangkan angka kemiskinan meningkat dari 7,16% menjadi 7,69%, angka ini juga masih lebih baik dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi capaian positif yang dicapai Kota Kediri adalah Indeks Kepuasan masyarakat meningkat sehingga mencapai 3,48 atau sangat baik, untuk Indeks Pembangunan Manusia mencapai 78,28. Dan ditunjukkan hasil dari lokadata bahwa Kota Kediri masuk 10 besar kota berkembang di Indonesia. Secara global menunjukkan data, terjadi adanya peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yaitu diangka 267% pada bulan Oktober tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁰ QRIS di Kota Kediri menyumbang adanya kenaikan tersebut, dengan adanya dukungan pemerintah Kota Kediri atas perkembangan pelaku UMKM dan sebagai bentuk salah satu strategi UMKM Kota Kediri tetap survive di tengah pandemic Covid 19.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Kediri lewat Dinas Koperasi Penerapan alternatif metode pembayaran non-tunai untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pemilik toko kelontong (*merchant*), akan tetapi terhalang oleh kendala-kendala seperti tidak stabilnya koneksi internet, permasalahan kuota internet, dan terkait biaya. Selain itu, terdapat faktor yang mendukung *merchant* berupa manfaat QRIS seperti mengurangi kontak fisik dan sebagai wujud alternatif dari metode pembayaran. Saran dari tim pengabdian adalah memperluas jangkauan terhadap partisipasi sosialisasi agar dapat memotivasi lebih banyak *merchant* yang menggunakan QRIS dan mengurangi kontak fisik sehingga ikut serta dalam upaya meminimalisir penyebaran covid-19.

²⁰<https://newssetup.kontan.co.id/news/transaksi-menggunakan-sistem-pembayaran-qr-is-mencatatkan-kenaikan?page=all>.

Daftar Pustaka

- Ade Resalawati, 2011. Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ssyarif Hidayatullah Jakarta*, 2011, 31
- Chua, W.F. (1986). *Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.
- Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). *Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research*, 117(June), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008>
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). *Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. British Dental Journal* Volume 204 No.6. DOI: 10.1038/bgj.2008.192
- Habiibah, U., Edenela, K., Alma Aprilia, H., & Puspa Ningrum, D. (2020). *PEMANFAATAN TRANSAKSI NON TUNAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KELURAHAN MANYARAN, SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG.*
- Kumar, A., Luthra, S., & Kumar, S. (2020). *COVID-19 impact on sustainable production and operations management.* 1(May), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2020.06.001>
- Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia (Perspektif Hukum Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 113-114.
- Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). *Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.3309>
- Nurlinda, N., Napitupulu, I., Wardayani, W., Azlina, A., Andina, A., Ulfah, A., & Supriyanto, S. (2020). *Can E-Commerce Adoption Improve SME's Performance? (Case Studies on Micro, Small and Medium Enterprises with Gojek Services in Indonesia).* <https://doi.org/10.4108/eai.11-12-2019.2290850>
- Resyniar, G. (2013). *Persepsi Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Brawijaya.*
- Rouillard, J. (2008). *Contextual QR Codes, Proceedings of the Third International. Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology.*
- Sofia, F. N. D. (2021). *Penggunaan Transaksi Digital Sebagai Alternatif Pencegahan Penyebaran Covid-19.*
- Suheriadi. (2021). *Implementasi QRIS Tembus 6,99 Juta Merchant, Ini Sebarannya.* <https://infobanknews.com/topnews/implementasi-qris-tembus-699-juta-merchant-ini-sebarannya/>
- Suryadi, D. F., & Ilyas, M. I. F. (2018). *Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula. Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan*

Humaniora, 2018, 75–80.

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

.Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu- Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 28.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

FAQ OVO Merchant. (2017). <https://ovo.id/faqmerchant>

Website

<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> diakses pada tanggal 17 agustus 2021

<https://newssetup.kontan.co.id/news/transaksi-menggunakan-sistem-pembayaran-qrisc-mencatatkan-kenaikan?page=all>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

<http://lkmsbwm.id/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

<https://indonesiabaik.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/umkm-pengguna-qrismeningkat-316-selama-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

<https://kemenkopukm.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.16 WIB

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/11> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.32 WIB

Wawancara

Wawancara dengan ibu Widya Retno Puspasari selaku KASUB. BAG. Umum dan Kepegawaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri